

DILEMA PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI BASIS TRANSFORMASI PADA GERAKAN JEMAAH TARBIYAH

Nasiwan

(FIS Universitas Negeri Yogyakarta (e-mail: iwanluny@yahoo.com))

Abstrak: Dilema Pendidikan Politik sebagai Basis Transformasi Gerakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dilema yang terjadi pada kegiatan pendidikan politik, yang dilakukan oleh organisasi Gerakan *Jemaah Tarbiyah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kritis. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dilengkapi dengan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, pendidikan politik pada fase gerakan dakwah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jemaah tarbiyah melakukan transformasi gerakan dengan mentransmisikan berbagai khasanah pengetahuan, sikap dan kesadaran politik yang dimiliki kepada anggota Jemaah Tarbiyah. Kedua, ada kecenderungan pendidikan politik dalam perjalanannya bergeser perannya lebih berfungsi sebagai instrumen indoktrinasi bagi partai sebagai pewarisan nilai-nilai dan pembenar berbagai kebijakan yang diputuskan oleh elit partai.

Kata kunci: pendidikan politik, transformasi, partai politik

THE DILEMMA OF POLITICAL EDUCATION AS A BASIS TRANSFORMATION OF GERAKAN JEMAAH TARBIYAH

Abstract: The Dilemma of Political Education as a Basis of Movement Transformation. This research aims to know the dilemma occurred within political education activities conducted by *Jemaah Tarbiyah* organization. The approach utilized in this research is qualitative approach employing critical analysis. The data were collected through documentation and in-depth interview. The research findings show: first, political education within the preaching movement phase has a capability to influence *Jemaah Tarbiyah* to transform the movement by transmitting various knowledge, attitude, and political awareness owned by the members of *Jemaah Tarbiyah*. Second, there is a tendency that the role of political education has shifted to be a doctrine instrument of the political parties as values inheritance and legitimating of the policies issued by political party's elites.

Key words: political education, transformation, political parties

PENDAHULUAN

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi kelangsungan hidup serta regenerasi suatu organisasi politik. Melalui kegiatan pendidikan politik anggota suatu organisasi politik, jemaah organisasi gerakan keagamaan mendapatkan transfer nilai dan warisan nilai-nilai dari generasi sebelumnya. Lebih dari itu melalui proses pendidikan politik anggota suatu partai politik disamping mendapatkan pengetahuan –wawasan politik juga dibentuk sikap dan kesadaran politiknya.

Melalui proses pendidikan politik anggota suatu organisasi politik dan warga negara pada umumnya memiliki kemungkinan untuk memiliki sikap yang idealis disatu sisi bersikap mendukung kebijakan Negara-pemerintah yang sesuai dengan aspirasi rakyat serta pada waktu yang sama juga memungkinkan untuk memiliki sikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Penegasan tentang urgensi pendidikan politik ‘*political education*’ antara lain disampaikan oleh (Gutmann, 1999:287) “... kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan politik— merupakan penanaman dari berbagai nilai-nilai kebaikan, pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan keniscayaan untuk dapat melakukan partisipasi politik – menjadi kewajiban moral utama dari berbagai tujuan pendidikan publik dalam masyarakat demokratis. Pendidikan politik menyiapkan warga Negara untuk terlibat dalam menghasilkan kesadaran masyarakat mereka dan kesadaran untuk reproduksi sosial yang ideal bukan hanya sekedar pendidikan demokrasi tetapi juga demokrasi politik”.

Terminologi pendidikan politik ‘*political education*’ sering dibedakan dengan sosialisasi politik ‘*political socialization*’. Oleh karena itu kiranya penting untuk diketengahkan terlebih dahulu pengertian pendidikan politik, sebelum pembahasan dilanjutkan ke persoalan utama penelitian ini.

Disamping terminologi *political education* dikenal juga terminologi lain yang perlu diklarifikasi, yakni term sosialisasi politik. Term *political socialization* dan *Political Education* menurut pandangan John J. Patrick, adalah merupakan term yang berbeda. Menurut (Patrick, 1997: 191) bahwa sosialisasi politik berkaitan dengan suatu proses dengan cara itu rakyat belajar

mengambil norma-norma, nilai-nilai, sikap dan menerima tingkah laku dan mempraktekannya melalui system yang sedang berlaku, sosialisasi politik merujuk pada penguasaan individu-individu tentang budaya politik atau norma-norma untuk mengelola kewenangan mendistribusikan keuntungan dan kerugian “*the authoritative distribution of advantages and disadvantages*”. Tujuan yang dituju melalui proses tersebut adalah perkembangan individu-individu yang dapat menerima motivasi-motivasi, kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang relevan dengan istem politik dari masyarakat mereka dan mewariskan norma-norma tersebut pada generasi penerus. (Renshon,1997: 191) Pendapat lainnya, Ben Rosemond, menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses atau serangkaian proses melalui itu rakyat belajar tentang politik dan memperoleh nilai-nilai politik” (Rosamond, 2002:58).

Sementara itu sarjana lain Bay menyatakan bahwa *political education* lebih luas daripada *political socialization*, lebih lanjut dia menyatakan; sebagaimana pada umumnya pendidikan, pendidikan ilmu politik harus memiliki tujuan untuk membebaskan mahasiswa dari tirai selubung kearifan konvesional, dari tabu-tabu politik dan symbol-simbol politik dengan demikian memiliki kemungkinan untuk membuat kemampuan untuk memilih bagaimana menjalani kehidupan dan dengan ide-ide politik sebagai pribadi yang idependen dengan kekuatan melakukan kritik yang optimal (dalam Cantori, dan Ziegler, 2002:191).

Menurut Pranger, pendidikan politik dalam makna yang luas menekankan pada terciptanya tertib politik ‘*political order*’ dan warga Negara sebagai aktor yang kreatif dalam sistem tersebut. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Entwistle, ia berpendapat bahwa “*political education, in contrast to socialization, seyogyanya membantu generasi muda belajar untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar politik mereka dan mempertimbangkan untuk memberikan jawaban-jawaban alternatif* (Cantori dan Ziegler, 2002:192).

Perbedaan makna antara *political socialization* dengan *political education* sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengembangan kurikulum dan disain pembelajaran, letak perbedaanya adalah bahwa mahasiswa yang mempelajari sosialisasi politik memiliki perhatian utama berkaitan dengan persoalan pemeliharaan sistem politik, terkait dengan pewarisan *orthodoxy* politik, mereka mempertanyakan bagaimana individu-individu belajar untuk mendukung status quo sosial politik, sebagaimana terbaca dalam norma-norma politik dan

kehadiran peran politik permanen. Pendidikan politik (*political education*) memiliki perhatian yang lebih luas. Pendidikan politik tidak hanya membatasi individu untuk belajar mendukung tatanan politik yang berlaku, tetapi juga meminta individu untuk belajar menciptakan dan merubah tatanan politik. “They should ask not merely how individuals learn to conform so that political orders endure; but they also should ask how individuals learn to create and to change political orders” (Renshon, 1997:193).

Dalam konteksnya dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada warga negara dimaknai sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 2006:256).

Berangkat dari berbagai perspektif sebagaimana telah dikemukakan, menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam pertama bagaimana peran pendidikan politik sebagai basis dari transformasi gerakan? kedua dilemma yang dialami oleh pendidikan politik sebagai instrument untuk melakukan transformasi?

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analitis kritis. Dengan pendekatan tersebut pembahasan dan kajian penelitian ini dilakukan dengan hati-hati, selektif sehingga akan menghasilkan pembahasan yang objektif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai dokumen yang terkait dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini. Metode wawancara mendalam dipakai untuk melengkapi mengumpulkan data yang belum dapat diraih melalui studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dilakukan diskripsi, kategorisasi, reduksi, seleksi, untuk mendapatkan data yang sah. Data dikumpulkan pada rentang waktu tahun 2009-2010.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi peserta kursus pendidikan politik di Kabupaten Sleman Yogyakarta, pengurus DPD PKS Sleman, Pengurus DPW PKS Yogyakarta, Pengurus DPP PKS Indonesia, tokoh –tokoh penting Gerakan Jemaah Tarbiyah, informan dari kalangan akademisi. Trianggulasi sumber dan isi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL

Peran Pendidikan Politik dan Dinamika Gerakan

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian dan pembahasan. Analisis berikut ini akan menyampaikan keterkaitan antara manhaj pendidikan politik (*manhaj tarbiyah siyasiyah*) Gerakan Tarbiyah dengan transformasi gerakan, yakni dari Gerakan Tarbiyah ke gerakan politik (partai politik). Dalam kaitan ini dilihat dari sisi genealoginya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai politik sesungguhnya telah ada jauh sebelum pendeklarasiannya pada 9 Agustus 1998 dengan wajah Partai Keadilan. Cikal bakal PK/PKS telah ada sejak pertengahan tahun 1980-an yang dikenal dengan kelompok tarbiyah (Hilal, 2003:87).

Pada masa Gerakan Tarbiyah itulah sebenarnya telah dilakukan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui suatu aktivitas pendidikan politik yang di kalangan mereka dikenal dengan kegiatan “*tarbiyah*”, yang kemudian istilah tarbiyah dilekatkan untuk memberi nama gerakan tersebut dengan nama ‘*Jemaah Tarbiyah*’ (Macmudi, 2008:10-11). *Jemaah Tarbiyah* setelah pendeklarasiannya ke dalam partai politik, kegiatan tarbiyah dengan berbagai variasi serta adaptasi terus dipertahankan. Kegiatan tarbiyah menjadi basis bagi oleh mereka diyakini sebagai basis bagi eksistensi PKS. Partai ini pada awal kelahirannya selanjutnya melakukan konsolidasi jaringan kepartaian, sebagaimana dikemukakan oleh Cahyadi Takariawan, “Setelah deklarasi kemudian dilakukan konsolidasi secara personal dan struktural, yakni mengumpulkan para aktivis dakwah di setiap wilayah untuk membentuk struktur PK” .

Pendidikan politik atau *tarbiyah siyasiyah* mulai terwadahi dalam kurikulum yang dibakukan sekitar 1421 H. Namun jauh sebelum eksistensinya sebagai partai politik, pendidikan politik sebenarnya telah ditanamkan sebagai fondasi dasar guna merealisasikan kemaslahatan dunia. *Tarbiyah siyasiyah* dipahami PKS sebagai salah satu aspek dari rangkaian tarbiyah secara keseluruhan, disamping adanya tarbiyah akidah, ibadah, serta akhlaq. PKS memandang politik (*siyasi*) dan dakwah sebagai satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan, sehingga strategi pembinaannya ditempuh pada dua sisi, yakni tarbiyah untuk menguatkan eksistensi dakwah dan jama’ah melalui sentuhan *tarbiyah harokiyah* dan tarbiyah untuk menguatkan eksistensi peran politik partai yang dilakukan melalui *tarbiyah hizbiyah* yang di dalamnya terdapat esensi *tarbiyah siyasiyah*. Keduanya terwadahi sebagai *tarbiyah islamiyah* yang pada hakikatnya menekankan setiap kader tarbiyah pada pembentukan *syakhsiyah islamiyah* (kepribadian muslim) sebagai teladan bagi manusia dan *syakhsiyah daiyah* (kepribadian dai) sebagai penyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam. (Wawancara dengan Takariawan, tanggal 24 Mater 2010, di Yogyakarta).

Ada tiga tahapan interaksi politik gerakan Islam sebagai bagian dari manifestasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS, meliputi hal-hal sebagai berikut. Tahap Pertama:

Penguasaan Ilmu Politik (*al-'ilm as-siyasi*). Penguasaan ilmu politik dibutuhkan untuk menentukan keshalihan langkah-langkah yang diambil saat terdapat dorongan dan respon politik dari dalam maupun dari luar, yang terdiri.

- 1) *Muthola'ah siyasiyah* (kritik atas literatur politik), meliputi: kajian bibliotik, bertemu dengan narasumber, pengamatan terhadap dinamika politik lokal, nasional, maupun internasional.
- 2) *Munawaroh siyasiyah* (dialog politik) dengan beragam aliran politik yang ada, peta dan rambu yang jelas, baik untuk lapangan konsepsional maupun operasional.
- 3) *Mutaba'ah siyasiyah* (pelaksanaan evaluasi) terhadap seluruh langkah yang telah diambil, sehingga akan diketahui seluruh ruang lingkup politik telah dipahami dengan baik.

Tahap Kedua: Melakukan Aksi Penyadaran (*Tan'iyah As-Siyasiyah*). Langkah tersebut ditempuh dengan menumbuhkan solidaritas internal para kader, baik yang terjun pada lapangan politik atau mereka yang mendukung dari luar serta diikuti dengan upaya penumbuhan lembaga-lembaga politik internal sebagai wahana *tadribat* (latihan) amal aktivis yang disiapkan terjun dalam kancah politik. Dalam tahap ini diikuti pula dengan upaya melakukan beberapa aksi politik, seperti: penyebaran teori politik Islam, aksi-aksi politik (*al-munawaroh as-siyasi*) dalam skala lokal, propaganda politik (*ad-di'yan as-siyasi*), pembentukan organisasi politik (*at-tanzim as-siyasi*), dan penetrasi politik (*al-ikhtiroq as-siyasi*).

Tahap Ketiga: Partisipasi Politik (*al musyarokah as-siyasi*). Diawali dengan partisipasi sosial (*musyarokah ijtima'iyah*) dalam bentuk keterlibatan aktif dalam upaya pengokohan dan penyehatan kondisi masyarakat dalam segala aspeknya, ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, dan maliyah. Dari hal tersebut diharapkan akan muncul pribadi-pribadi yang dikenal dan mengakar pada masyarakat, selanjutnya akan terbentuk dukungan masyarakat dan program-program yang membunai serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan basis dukungan masyarakat yang kokoh, maka langkah berikutnya diharapkan akan menjadi mudah. Pembentukan institusi politik akan memiliki dukungan publik yang memadai, begitu pula ketika memasuki arena Pemilu (*al-intikhobiyah*), memasuki parlemen, maupun pemerintahan. (Jasiman, 2005:10)

Tahapan, strategi dan model pendidikan politik yang dieksperimenkan oleh partai politik -- yang lahir dari rahim Gerakan Islam -- memungkinkan partai tersebut melakukan transformasi diri dan melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan politik (*political oppurnutiy structure*). (Roy, 1999). Bentuk pendidikan politik (*tarbiyah siyasah*) yang dalam derajat

tertentu mampu untuk mempengaruhi terjadinya transformasi gerakan – dari ‘gerakan dawah tarbiyah’, *social movement ke model political movement*—Transformasi ini berlangsung dengan memanfaatkan momentum dan peluang politik yang ada (reformasi tahun 1998) hal ini dapat dibaca dengan jelas pada kelahiran dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Danamik, 2002:115).

Untuk menganalisis sistem pendidikan politik PKS, maka akan dianalisis pada tiga dimensi pokok, yakni: dimensi tujuan, metode, dan kurikulum cakupan. (Kurikulum Tarbiyah Siyasah Buku1,2000). Tujuan pendidikan politik PKS pada fase gerakan dakwah adalah mewujudkan keberdayaan politik yang berakar pada doktrin amar ma’ruf nahi mungkar sebagai kewajiban setiap muslim, sehingga memungkinkan setiap kader menjadi mandiri yang pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi pada pembentukan umat dan masyarakat politik yang mandiri pula. Dalam konsekuensi logis keterlibatannya di ranah politik, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS hendak pula memberikan batasan-batasan moralitas politik kepada pengurus dan kader, memberikan kerangka konseptual tentang landasan-landasan syar’i terkait aktivitas berpolitik, serta memberikan penguatan terhadap *musyarakah siyasiyah* (partisipasi politik). (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2000)

Sebagaimana penuturan Idham Ananta Timur bahwa esensi *tarbiyah siyasiyah* PKS sebagai *long life education* ditujukan pada ketercapaian akan tiga aspek, yakni: kepribadian politik, sikap politik, serta mobilisasi politik kader (wawancara dengan Idham Ananta Timur,25 Maret 2010). Hal senada dikemukakan pula oleh Takariawan yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan politik PKS adalah memunculkan *wa’yu siyasi*, menguatkan *musyarakah siyasiyah*, serta mengkristalkan kepribadian politik kader dan pengurus. Sementara itu bentuk gerakan politik moral yang diekspresikan oleh PKS dimaksudkan untuk memberikan suatu keteladanan sebagai manifestasi pendidikan politik kepada masyarakat (wasancara dengan Takariawan,24 Maret 2010). Adapun metode yang diimplementasikan PKS dalam pendidikan politiknya, meliputi: ceramah, diskusi, praktek (berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, provokasi dan advokasi, pengambilan keputusan, manajemen kampanye, dan perencanaan), mandiri (tugas membaca, menulis, dan orasi politik), *case study* (studi kasus), panel, *personal action plan*, dan demonstrasi/aksi.(Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2000)

Kurikulum cakupan dalam manhaj/format pendidikan politik PKS berdasarkan rangkuman peneliti terdiri atas kelompok materi sebagai berikut.

1. Keislaman:
 - 1) Syumuliyatul Islam dan sejarah politik Islam
 - 2) Tauhid: Paradigma keyakinan muslim
 - 3) Islam sebagai pedoman hidup
 - 4) Islam sebagai landasan filosofi dan landasan operasional dalam berpolitik
 - 5) Dakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*
 - 6) Masyarakat Islam dalam perspektif Qur'an dan sunnah
 - 7) Konsep perubahan masyarakat dalam persektif Islam
 - 8) Syuro: prinsip, etika, mekanisme, dan praktik historisnya
 - 9) Fiqih ikhtilaf: kaidah dan aplikasinya dalam kehidupan
2. Kepartaian :
 - 1) Sejarah dan jati diri Partai Keadilan
 - 2) Konstitusi dan Asas Partai Keadilan
 - 3) Ideologi, nilai-nilai, dan manhaj Kepartaian
 - 4) Identitas Partai Keadilan
 - 5) Sanksi-sanksi Organisasi
 - 6) Partai Keadilan dalam format politik di era reformasi
 - 7) Doktrin kejuangan Partai Keadilan
 - 8) Partai Keadilan sebagai partai dakwah
 - 9) Partai Keadilan diantara Partai-Partai Islam
 - 10) Kader Cita Partai Keadilan
 - 11) Strategi Partai Keadilan dalam Transformasi Sosial
 - 12) Partai Keadilan dalam Pemberdayaan Umat
3. Pengenalan struktur dan pengurus partai
4. Wawasan, yang terdiri dari:
 - a. Wawasan Politik, yang meliputi:
 - 1) Dasar-dasar Politik Islam
 - 2) Sistem Politik Indonesia
 - 3) Sistem Hubungan Sosial dalam Islam
 - 4) Potret realitas politik dunia Islam kontemporer
 - 5) Pemerintahan dan sosial politik
 - 6) Sosial kemasyarakatan, dakwah, dan tarbiyah
 - 7) Saluran Politik
 - 8) Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin
 - 9) Dakwah Partai
 - b. Wawasan sejarah:
 - 1) Perjuangan politik umat Islam di Indonesia
 - 2) Sejarah Perpolitikan Indonesia
 - 3) Realitas Politik Islam di Era Khulafa'Rasyidin
 - 4) Sejarah kejayaan peradaban umat Islam
 - 5) Perjalanan Gerakan Dakwah Pemuda dan Dakwah di Negeri-negeri Muslim *Al-Khashaisul Amal Syar'iyah*

5. Ketrampilan:

- 1) Pengenalan dasar-dasar organisasi
- 2) Manajemen organisasi
- 3) *Leadership*
- 4) *Problem solving*
- 5) Teknik diskusi dan pengambilan keputusan
- 6) Pembentukan Opini Publik
- 7) Berfikir kreatif
- 8) *Strategic planning*
- 9) *public speaking skill*
- 10) *debating skill*
- 11) *lobby and negotiating skill*
- 12) *leadership skill*
- 13) teknik investigasi
- 14) teknik mobilisasi massa
- 15) media relations
- 16) analisis wacana
- 17) *legal drafting*
- 18) *budgeting skill*
- 19) *evaluation skill*
- 20) *management conflict*
- 21) Pengembangan diri (*self development*)
- 22) *kepemimpinan (leadership)*

6. Pelengkap

- 1) Serba-serbi DPC
- 2) Serba-serbi DPD
- 3) Serba-serbi DPW
- 4) Serba-serbi DPP
- 5) Workshop, membuat perencanaan strategi sebuah DPC/DPRa
- 6) Workshop: membuat perencanaan strategi sebuah DPD. (Sumber: Diolah

dari berbagai dokumen internal PKS, 2000-2007, “Modul Tarbiyah Islamiyah”, diterbitkan oleh Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah (LKMT) dan Robbani Press, Jakarta, 2009).

Dari struktur materi yang dipelajari dalam kegiatan Tarbiyah Siswasiyah PKS sebagaimana telah dipaparkan di atas kiranya dapat diklasifikasikan kedalam format seperti tertulis pada uraian berikut ini.

Tabel 1. Manhaj/Sistem Pendidikan Politik PKS

ATRIBUT/ CIRI-CIRI DASAR	
Dimensi Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengantarkan manusia menuju kesempurnaannya sebagai makhluk <i>siasah</i>, 2. memunculkan sosok kader yang memahami identitas dan ideologi Islam, 3. memahami strategi pertahanan partai, 4. mendorong aktivitas politik kader maupun masyarakat sebagai bagian dari amal Islami, 5. melakukan penguatan sekaligus peningkatan kapasitas pemahaman, kesadaran, serta partisipasi kader dalam dunia politik, 6. membekali kader untuk dapat memunculkan kultur politik baru, 7. merealisasikan pemberdayaan masyarakat, serta 8. membekali kader agar memiliki kualitas, dan kelaikan, serta sanggup menghadapi tantangan internal maupun eksternal di pentas politik.
Dimensi Metode	Ceramah, diskusi (kelompok/ publik), praktek (berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, provokasi dan advokasi, pengambilan keputusan, manajemen kampanye, dan perencanaan), mandiri (tugas membaca, menulis, dan orasi politik), <i>case study</i> (studi kasus), <i>personal action plan</i> , dan demonstrasi/aksi.
Dimensi Kurikulum Cakupan	Keislaman, kepartaian, pengenalan struktur dan pengurus partai, wawasan (wawasan sejarah dan politik), ketrampilan, dan kelompok materi pelengkap.

Diolah dari berbagai sumber dokumen internal PKS 2000-2007

Manhaj pendidikan politik (tarbiyah siswasyah) yang dimiliki oleh Gerakan Tarbiyah dapat dilihat dari sisi tujuan, cakupan materi yang disampaikan, memberikan peluang gerakan dakwah ini memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi internal pada level individual maupun secara kelembagaan. Dengan kata lain kiranya dapat dinyatakan bahwa dari sisi orientasi Gerakan Tarbiyah memiliki seperangkat pengetahuan, untuk menjadi media transformasi. Kekuatan kegiatan Tarbiyah sebagai media transformasi memiliki pijakan pada pemahaman yang dimiliki oleh aktivis gerakan ini yang memandang bahwa antara siyasi dan dakwah adalah merupakan satu kesatuan. PKS memandang politik (*siyasi*) dan dakwah sebagai satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan, sehingga strategi pembinaannya ditempuh pada dua sisi, yakni tarbiyah untuk menguatkan eksistensi dakwah dan jama'ah